

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD

Bimtek DPRD Kabupaten Berau
Hotel Horison, Semarang, 28 Nov 2014

Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

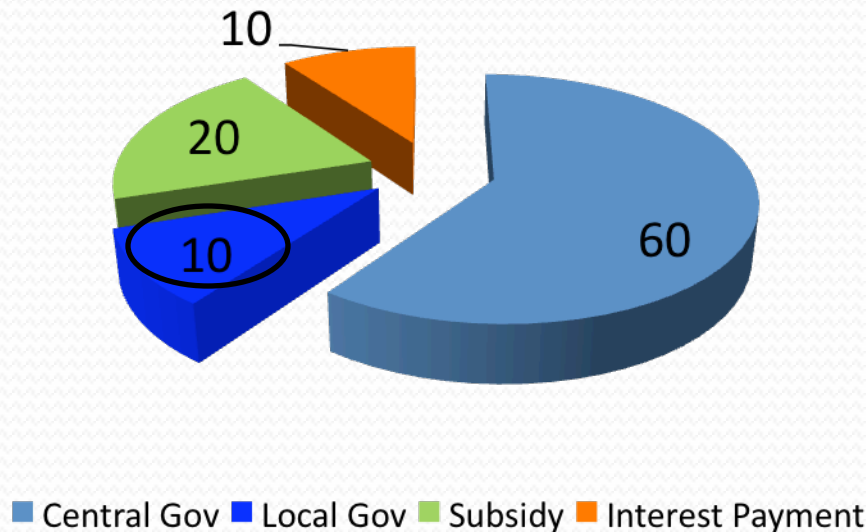
081 328 488 444

APBD 2014 Kab Berau

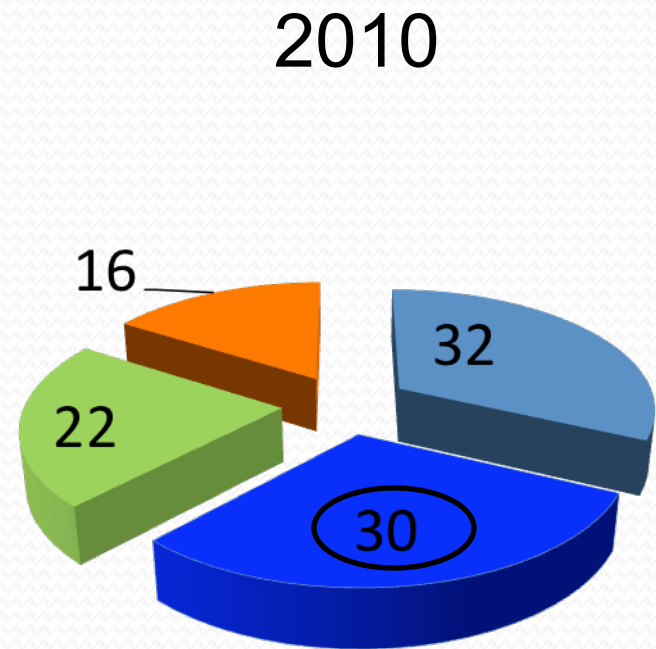
Uraian	Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan	1,948,966	68.46
Pendapatan Asli Daerah	160,403	5.63
Dana Perimbangan	1,371,958	48.19
Pajak Daerah	26,406	0.93
Retribusi Daerah	10,648	0.37
Lain-lain Pendapatan	91,770	3.22
Total Belanja	2,846,806	100.00
Belanja Tidak Langsung	665,713	23.38
Belanja pegawai	540,740	18.99
Hibah	20,458	0.72
Bantuan sosial	9,146	0.32
Bantuan keuangan	89,375	3.14
Belanja tidak terduga	2,559	0.09
Belanja Langsung	2,181,092	76.62
Belanja pegawai	143,698	5.05
Belanja barang & jasa	766,135	26.91
Belanja modal	1,271,259	44.66
Pembiayaan Daerah	897,839	31.54
SiLPA	897,839	31.54
Pengeluaran	-	0.00
Defisit	(897,839)	-31.54

Dari APBN ke APBD

Desentralisasi Fiskal telah mengalihkan sebagian sumber dana publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Apakah ini sudah efektif?

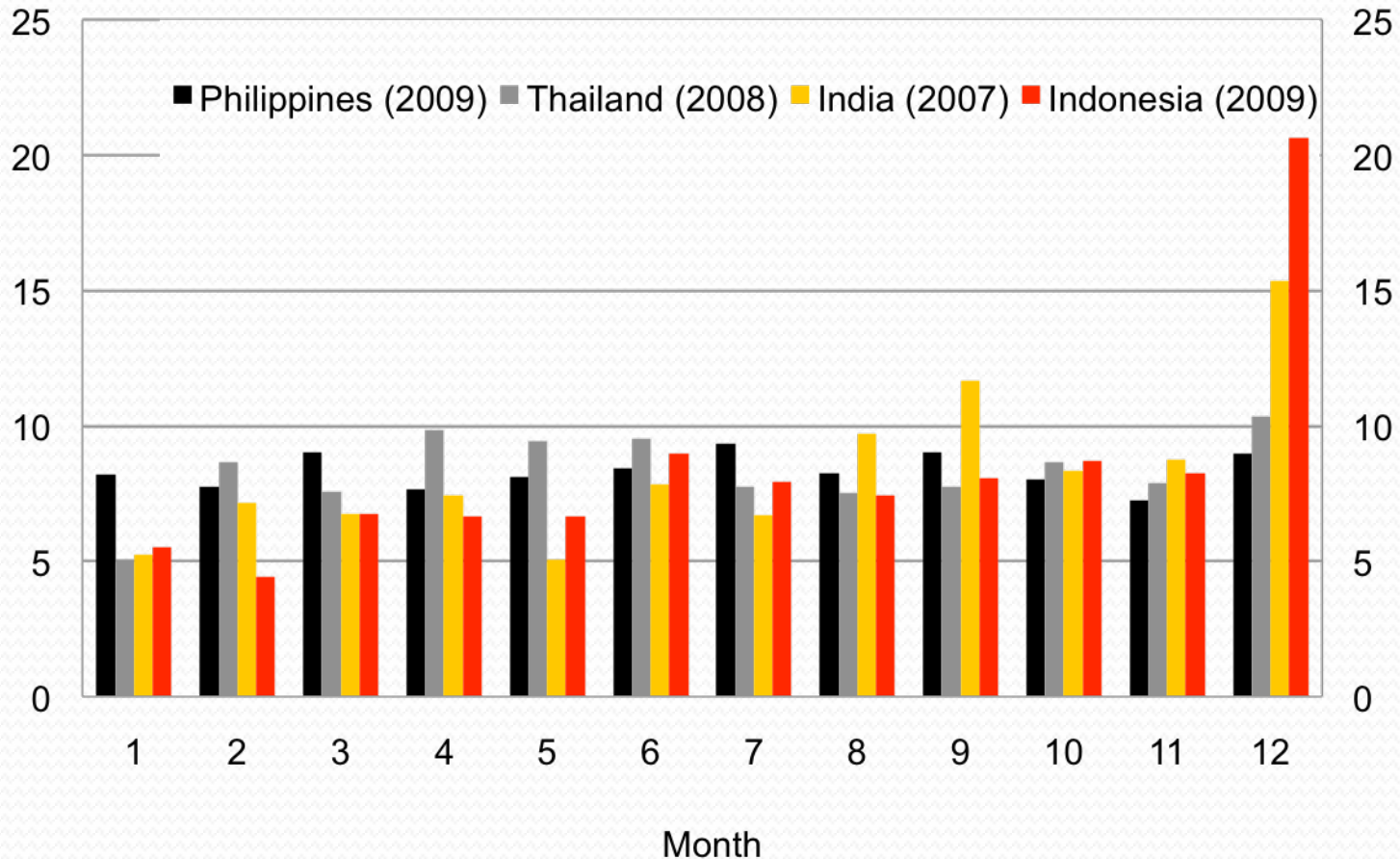


2000



Central Gov Local Gov Subsidy Interest Payment

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



Source: CEIC, World Bank

Tujuan Pembangunan Daerah


1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH

1. Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self-financing” ke “external control”?)
 2. PDRB per kapita meningkat, tetapi horizontal imbalance juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis)
- ∞ Peningkatan tax effort diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya dengan investasi)
 - ∞ Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp 43 T), belanja kurang efektif (Depkeu, 2009)
 - ∞ Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.

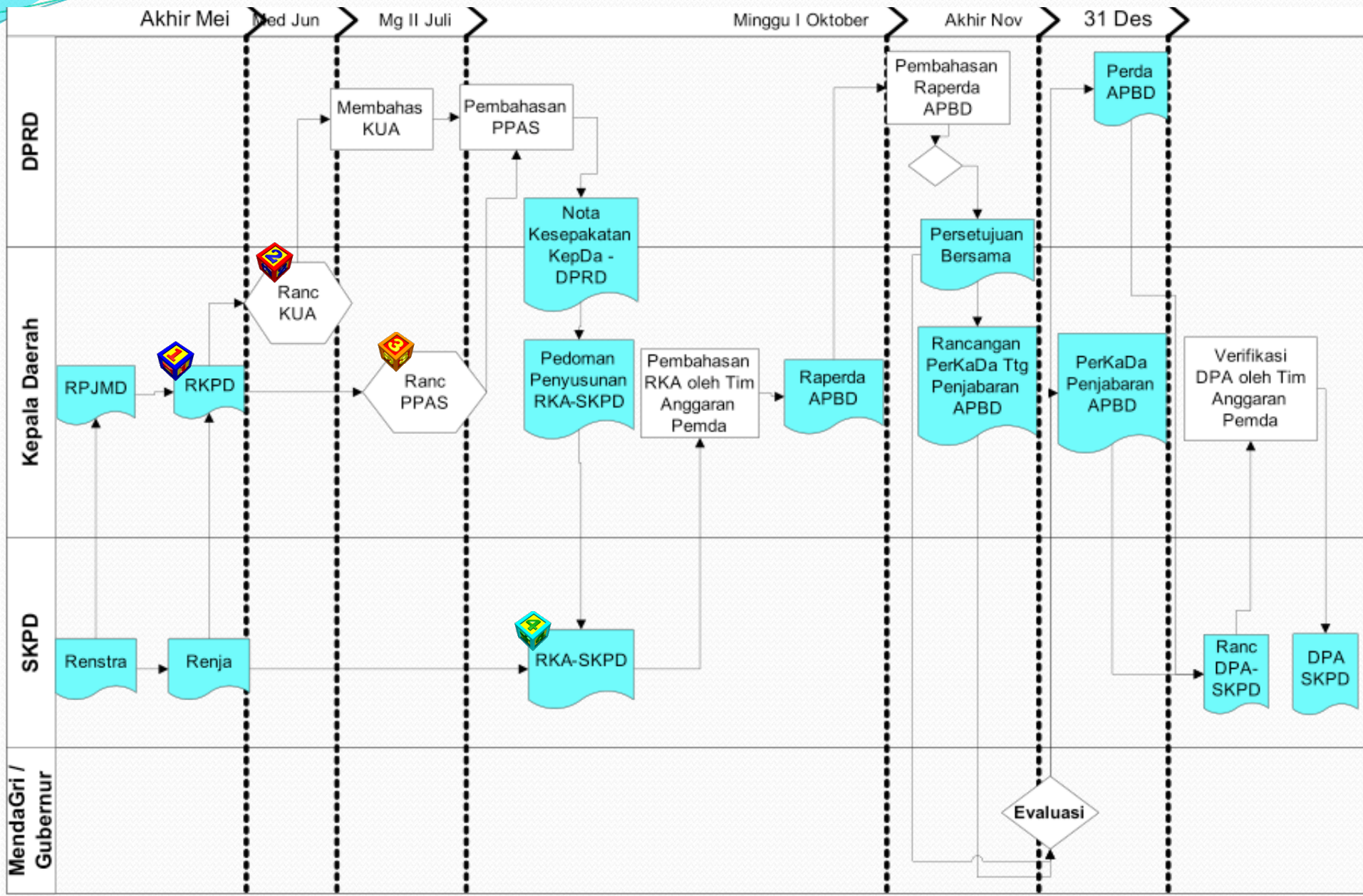
Analisis Kepentingan Stakeholders

- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.

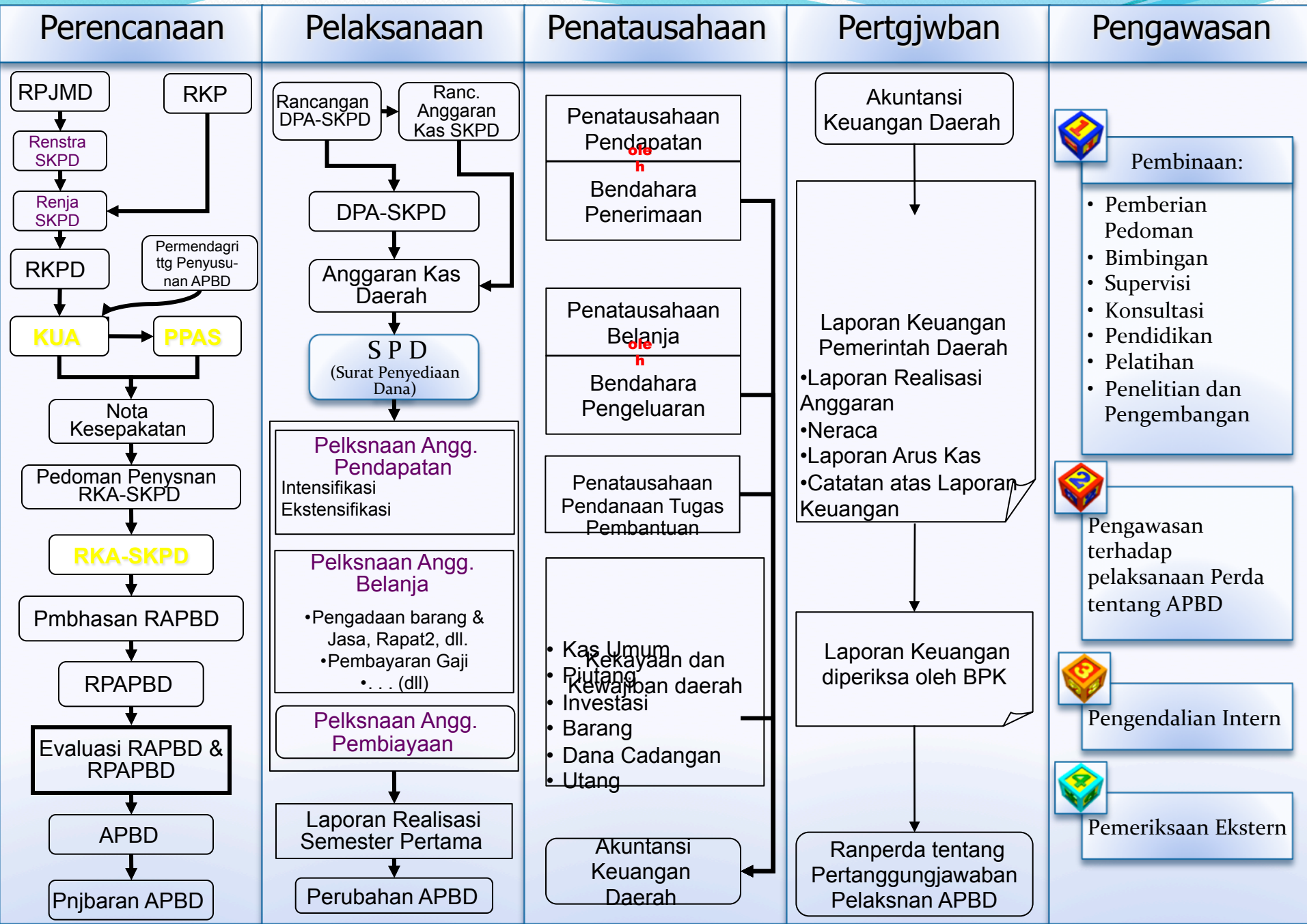


Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

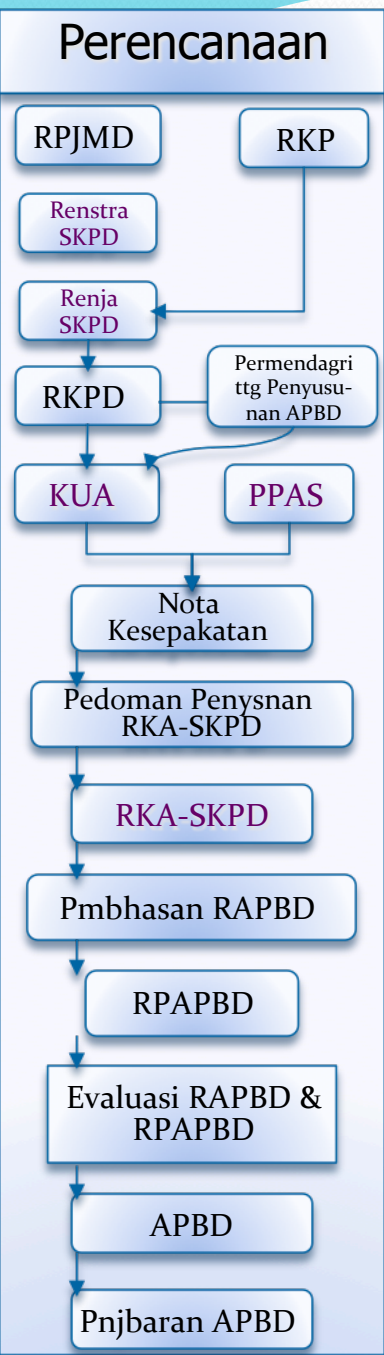
JADWAL PENYUSUNAN APBD



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KEBIJAKAN UMUM APBD



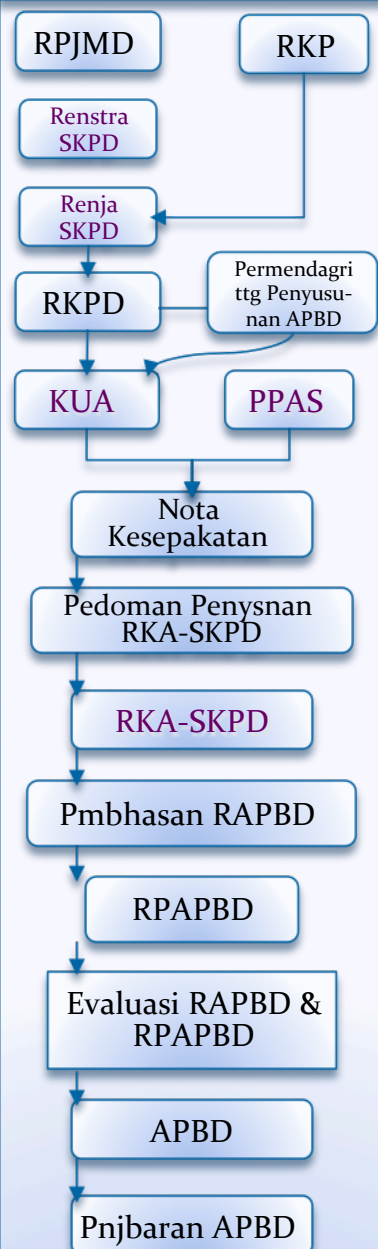
- KUA memuat:
 - target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
 - proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan
 - asumsi yang mendasarinya target dan proyeksi

- Pembahasan KUA dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- Disepakati dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Perencanaan



- PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara :
 - **Rancangan program prioritas** dan **patokan batas maksimal anggaran** yang diberikan kepada SKPD
 - Acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- Disusun dengan tahapan sbb:
 - menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

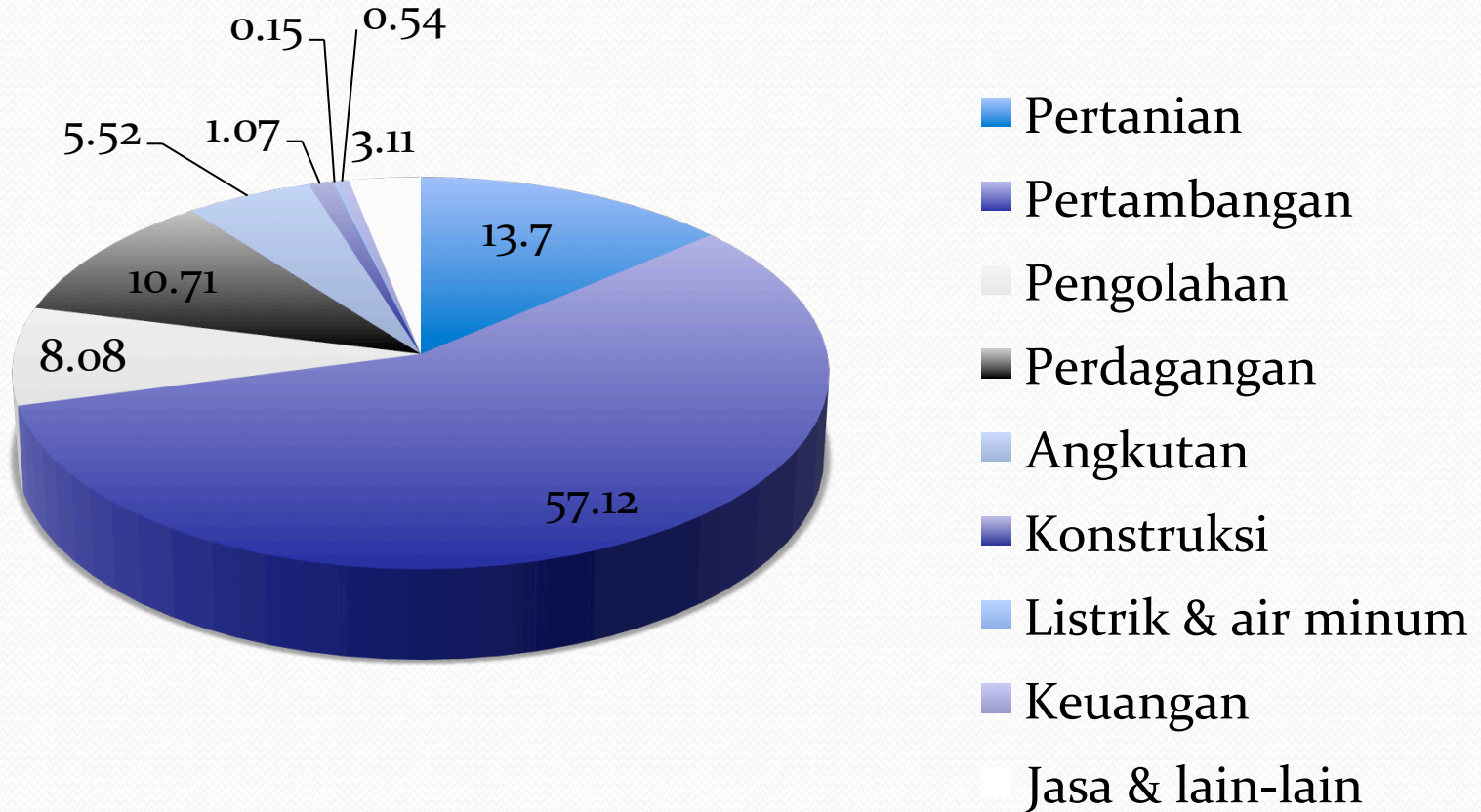
Catatan ttg APBD & Pembangunan Berau

1. Pengesahan: APBD termasuk paling cepat disahkan (th 2012). Apakah karena proses politik yg relatif sejuk atau karena kurang cermat penentuan prioritasnya?
2. Ketergantungan penerimaan daerah kepada subsidi Pemerintah Pusat tinggi (PAD hanya 5.63% dari total Belanja).
3. Daya serap rendah; TA 2011 rerata hanya terserap sebesar 74,4% (Tertinggi kantor Bupati: 94,9%; terendah Dinas Kehutanan: 8,4%).
4. Perlu perhatian lebih besar kepada pembiayaan infrastruktur (jalan, jembatan, telekomunikasi).
5. Kualitas SDM masih rendah (Tenaga-kerja 49,8% lulusan SMA, banyak yg tidak tamat SD).

Pencari Kerja Kurang Kompetitif

Tak Tamat SD	646	9.52
SD	253	3.73
SMP	624	9.20
SMA / SMK	3.382	49.86
Diploma	951	14.02
S1 Ke Atas	927	13.67
	6.783	

Penyumbang PDRB Kab Berau, 2011



Kedudukan Keuangan DPRD (PP No.21/2007)

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?

Isu Pokok Lingkungan Hidup Kab Berau

1. Penurunan kualitas air sungai dan kerusakan hutan dan lahan.
2. Pencemaran dari buangan air limbah, pembukaan areal hutan dan lahan dari kegiatan industri serta sampah domestik
3. Kerusakan hutan dan lahan
4. Tidak tertutupnya kembali areal bekas tambang yang meninggalkan lubang-lubang yang luas dan dalam.

Kerusakan Lingkungan



Bekas tambang batubara &
pembukaan lahan sawit,
Tanjung Redeb

Sekitar 60% bekas lahan tambang
belum direboisasi. Bgm nasib PBH
(Program Berau Hijau), REDD?



Alternatif PAD, Pemberantasan Kemiskinan...



Retribusi izin usaha perikanan dihapus. Bagan tancap didorong berganti ke bagan apung. Bgm dg PAD? (Pantai Tanjung Batu)



RT miskin di pesisir selatan Berau sekitar 3.035 KK. (Kec: Tabalar, Tasilayan, Batu Putih, Biatan, Biduk-biduk). Apa yg sdh dilakukan Pemda?

Peran Legislatif: Daftar Perda di Kab Berau

1. Perda No.4/2004 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perda No. 6/ 2004 ttg Pola Retribusi Badan Pengelola RSUD dr Abdul Rifai
3. Perda No. 6/ 2005 ttg Adminduk
4. Perda No.7/2004 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan
5. Perda No.7/2005 ttg Penyelenggaraan Terminal Transportasi
6. Perda No.7/2006 ttg Bantuan Keuangan Kepada Parpol
7. Perda No.8/2004 ttg Izin Usaha Kepariwisataaan
8. Perda No.8/2005 ttg Retribusi Terminal Transportasi
9. Perda No.8/2006 ttg Perhitungan APBD
10. Ranperda No... th 2008 ttg Pelaksanaan Program Jamsostek

→ Mana Perda yg berorientasi kepada kemakmuran rakyat?

Alokasi Belanja SKPD (2011) Kab Berau

No.	SKPD	Rp (jutaan)
1.	Dinas Pendidikan	298.504,06
2.	Dinas Kesehatan	382,63
3.	RSUD Dr. Abdul Rifai	39.619,67
4.	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	74.435,08
5.	Dinas Pekerjaan Umum	409.190,89
6.	Dinas Kebersihan, Pertamanan & Damkar	14.934,56
7.	Dinas Koperasi dan Perindag	13.453,74
8.	Sekretariat Daerah	91.851,33
9.	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah	31.779,74
10.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	10.036,75
11.	Dinas Perkebunan	9.130,58
12.	Dinas Pertambangan dan Energi	14.172,32
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.900,17
14.	Sekretariat DPRD	24.577,03
15.	Kecamatan	33.177,31

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud "menyembunyikan" pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. Mark-up (penggelembungan) anggaran
 - Alokasi anggaran kembar
 - Anggaran tanpa rincian
 - Menghilangkan pos anggaran
 - Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang cash.

Sumber: ICW, 2007

PENUTUP

Fungsi pokok DPRD dalam penyusunan APBD adalah pada perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan.

Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik? Banyak pertanyaan yang harus dijawab.

SEKIAN